TINJAUAN YURIDIS FAKTOR PEMBERAT DAN YANG MERINGANKAN DALAM PUTUSAN PIDANA TERHADAP KURIR NARKOTIKA DI INDONESIA (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl)

Saisar Rahmad Saputra^{a1}, Rangga Jayanuarto^{b2}, Hendi Sastra Putra^{c3}, Mikho Ardinata^{d4}

^{a1} Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4} Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Kata Kunci:

Narkotika, Kurir, Faktor Pemberat, Faktor Peringan

Peran kurir sebagai pelaku yang membawa serta menyebarkan narkotika menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, tinjauan yuridis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi putusan pidana terhadap kurir narkotika menjadi penting demi menjaga keadilan dan efektivitas hukum di Indonesia. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal apa saja yang dapat dipertimbangkan sebagai faktor pemberat dan faktor peringan dalam penjatuhan pidana dan untuk mengetahui pengaruh pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan tersebut dalam penjatuhan pidana. Dengan metode penelitian Yuridis Empiris, diharapkan membantu memaksimalkan penelitian ini. Putusan nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl, keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba, dan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa belum pernah dihukum. Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah : Fakta-Fakta yang didapat di persidangan , Barang bukti yang ditemukan di tempat keadian perkara,Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal yang memberatkan dan meringankan, Ketentuan pidana yang dilanggar. diharapkan Hakim senantiasa harus memperbaiki dan menambah ilmu pengetahuannya dan senantiasa mengikuti perkembangan hukum dan keadilan masyarakat sehingga menjadi hakim yang lebih profesional dan berintegritas hingga mampu menyajikan putusan yang berkualitas dengan pertimbangan luas dan juga harus memiliki integritas moral dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

PENDAHULUAN

Narkotika pada dasarnya digunakan sebagai obat apabila penggunaannya digunakan secara tepat berdasarkan aturan-aturan medis yang ada. Akan tetapi saat ini sudah banyak yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan prosedur kesehatan. Penyalahgunaan dari narkotika ini bisa dikenakan sanksi hukum sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Selain itu kandungan dari narkoba dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan apabila disalahgunakan. Meskipun ada beberapa jenis narkoba yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan yang ketat dari dokter.

Penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada taraf memprihatinkan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaan yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaannya juga telah menjalar hampir kelapisan masyarakat mulai dari pelajar hingga pejabat negara pun terlibat dalam tindak pidana narkotika ini. Peredaran narkotika di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Kebiasaan setiap pelaku untuk menggunakan atau melakukan penyalahgunaan narkotika adalah pada awalnya mencoba sehingga merasa ketagihan dan pada akhirnya kecanduan untuk memenuhi kebutuhan ketergantungannya dengan berbagai cara.

Maraknya penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari semakin merugikan dan membahayakan dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Merugikan bagi perorangan serta rasional dari masyarakat atau penguasa untuk menanggulangi kejahatan.¹ Menjalarnya penyalahgunaan narkotika di berbagai usia, baik anak-anak hingga orang tua mengakibatkan munculnya permasalahan perilaku bagi orang yang menyalahgunakan narkotika seperti mencuri, merusak fasilitas umum, membuat kerusakan dalam masyarakat, membunuh bahkan bisa juga menjadi pengedar narkotika. Selain itu, juga dapat mengakibatkan yang bersangkutan menjadi ketergantungan narkotika yang kemudian untuk memperoleh narkotika tersebut berusaha dengan menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama, maupun hukum yang berlaku.²

Penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkotika yaitu adanya beragam macam bentuk dan cara dalam peredaran narkotika di Indonesia, yang selalu membuahkan keberhasilan untuk menemukan jalan pintas guna mengedarkan narkotika tanpa diketahui oleh para aparat penegak hukum. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan dengan menutup pintu bagi konsumen narkotika yang tidak sah, sehingga arus peredaran gelap narkotika terputus, tidak sampai beredar ke tingkat paling bawah.³ Banyaknya kasus peredaran narkotika yang tidak hanya dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang secara bersamaan, bahkan menjadi sebuah sindikat yang terorganisasi yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.⁴

Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan sebagai negara kepulauan dengan luas pantai serta sungai-sungai besar yang belum sepenuhnya diawasi oleh negara, menjadikan Indonesia sebagai daerah rawan dipergunakan untuk penyeludupan narkotika,⁵ dan juga menjadi wilayah pemasaran alihan dari sindikat narkotika

¹ *Op.cit*, hal 170.

² *Op.cit*, hal 170.

³ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal 160.

⁴ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hal 4.

⁵ Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika Dan Napza?*, ALPRIN, Semarang, 2010, hal 1

internasional. Banyaknya hal yang mempengaruhi kerentanan Indonesia terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika yaitu kondisi geografis, geopolitic, sosial ekonomi, arus informasi, dan globalisasi, perubahan sosial modernisasi, dan perubahan gaya hidup. Selain itu, lemahnya pengawasan dari pemerintah dalam peredaran narkotika yang menyebabkan para bandar narkotika lebih mudah memperluas jaringannya. Peredaran narkotika di Indonesia, umumnya disebar di tempat-tempat hiburan seperti diskotik, bar, dan karaoke yang banyak dikunjungi oleh para pemuda.⁶

Dari kasus di atas, narkotika menjadi suatu permasalahan yang tidak habis dibahas, meskipun semua orang telah mengetahui efek buruk dari barang haram tersebut, tetapi masih cukup banyak masyarakat yang terperangkap dari jeratannya,⁷ juga terlihat bahwasannya peredaran narkotika yang meluas hampir ke seluruh wilayah Indonesia tanpa memandang gender, usia maupun status sosial. Meluasnya peredaran narkotika ini tidak terlepas dari kurir narkotika. Kurir narkotika merupakan perantara yang sangat dibutuhkan oleh para Bandar narkotika untuk memperlancar bisnis narkotika tersebut yang mendapatkan keuntungan.

Penyebab orang yang bekerja sebagai kurir atau perantara narkotika itu adalah faktor ekonomi. Seseorang dengan perekonomian yang rendah akan menempuh berbagai jalan pintas guna untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, seperti melakukan pekerjaan sebagai perantara atau kurir narkotika dalam peredaran narkotika tingkat nasional maupun internasional. Selain faktor ekonomi, ada faktor lain berupa sulitnya lapangan pekerjaan, tanpa penghasilan yang tetap juga membuat seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melanggar undang-undang yaitu salah satunya menjadi perantara atau kurir narkotika walaupun memiliki resiko tinggi yang membahayakan diri sendiri. Tentunya hal ini dimanfaatkan oleh para bandar narkotika untuk merekrut para kurir atau perantara narkotika tanpa memandang usia, gender, dan status sosial, dengan diberikan bayaran yang cukup menggiurkan setiap kali melakukan pekerjaan mengantar narkotika kepada konsumen walaupun menimbulkan resiko yang sangat tinggi seperti dijatuhi hukuman pidana bahkan pidana mati.

Melihat berbagai faktor yang melatarbelakangi seseorang bekerja sebagai kurir atau perantara narkotika, dan dari banyaknya kasus peredaran narkotika dengan menggunakan kurir narkotika di Indonesia, serta banyak kurir narkotika mendapatkan hukuman yang cukup berat, akan tetapi para bandar maupun pengedar narkotika justru dapat memperluas daerah pengedaran bisnis haramnya, bahkan para bandar mengendalikan peredaran narkotika. Maka penting dilakukannya penelitian mengenai tinjauan yuridis factor pemberat dan yang meringankan dalam putusan pidana terhadap kurir narkotika di Indonesia (studi putusan nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan hukum empiris berfokus pada pengamatan dan analisis fenomena hukum yang ada dalam Masyarakat dengan metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data secara mendalam dan penekanan pada interpretasi naratif. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil temuan penelitian melalui wawancara terhadap informan penelitian, untuk selanjutnya dilakukan analisis secara deduktif untuk menginterpretasikan data secara narasi.

⁶ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 4.

⁷ Kaha Anwar, *Ensiklopedia Populer Narkoba*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2017.

PEMBAHASAN

Hal-Hal yang Dapat Dipertimbangkan Sebagai Keadaan Memberatkan dan Keadaan Meringankan dalam Penjatuhan Pidana.

Dalam putusan nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl tindak pidana berawal pada bulan Mei 2023 dimana Eka Galang berkomunikasi dengan Andre melalui telfon genggam kemudian menawarkan pekerjaan kepada Eka Galang untuk menjual Ganja di Bengkulu. Setelah itu kemudian Eka Galang mengajak Putra Nanda Herman sebagai rekan untuk berbagi modal membeli ganja ke saudara Andre dan akan menjualnya di Bengkulu, untuk pengiriman barang (ganja) tersebut Eka Galang mengatakan akan melalui jasa pengiriman JNT, kemudian Putra Nanda Herman mendengar hal tersebut menyetujui untuk ikut berjualan ganja tersebut.

Tindakan ini merugikan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba karena mereka bertentangan dengan tujuan dari program pemerintah tersebut. Program tersebut mungkin bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, mengurangi tingkat kejahatan terkait narkoba, serta mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketika ada terdakwa yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan program pemerintah tersebut, mereka secara tidak langsung membahayakan masyarakat dan menghambat upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari peredaran narkoba. Ini adalah pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi hukum yang berat sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Dalam pertimbangan putusan tersebut, hakim menyebutkan beberapa keadaan yang memberatkan dan meringankan tindak pidana. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba. Ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran narkoba, itu berarti mereka melakukan kegiatan yang mendukung atau melibatkan diri dalam peredaran narkoba. Ini bisa mencakup berbagai aktivitas, seperti memproduksi, menyelundupkan, menjual, atau bahkan menggunakan narkoba. Kemudian keadaan yang meringankan terdakwa antara lain :

1. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Ketika seorang terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, itu mencerminkan penghargaan mereka terhadap proses hukum dan institusi peradilan. Sikap sopan ini dapat mencakup berbagai hal, seperti berbicara dengan hormat kepada hakim, jaksa, dan pihak lain yang terlibat dalam proses persidangan, mengikuti aturan dan prosedur persidangan dengan baik, serta menunjukkan kerendahan hati dan kesopanan dalam interaksi dengan semua pihak yang terlibat.

Menunjukkan sikap sopan selama persidangan juga dapat membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif di pengadilan. Hal ini dapat memengaruhi persepsi hakim dan juri terhadap terdakwa, dan dapat memengaruhi keputusan akhir dalam kasus tersebut. Sikap sopan yang konsisten juga dapat memberikan kesan positif tentang karakter dan kepribadian terdakwa kepada pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Selain itu, sikap sopan juga mencerminkan kematangan dan tanggung jawab terdakwa dalam menghadapi situasi yang sulit. Meskipun mereka berada dalam posisi yang sulit karena terlibat dalam proses hukum, tetapi sikap sopan dan menghormati proses peradilan dapat memberikan kesan bahwa mereka siap untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghadapi konsekuensinya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa sikap sopan terhadap terdakwa selama persidangan tidak akan secara langsung mempengaruhi hasil hukum. Keputusan akhir akan didasarkan pada bukti-bukti yang disajikan di pengadilan dan pertimbangan hukum yang tepat. Namun demikian, bersikap sopan tetaplah penting sebagai bagian dari partisipasi yang bermartabat dalam sistem peradilan.

2. Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Ketika para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, itu mencerminkan sikap bertanggung jawab dan kematangan dari pihak terdakwa dalam menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Tindakan ini menunjukkan bahwa mereka mengakui kesalahan yang telah mereka lakukan dan siap untuk menerima tanggung jawab atas perbuatan mereka.

Ada beberapa alasan mengapa para terdakwa mungkin memilih untuk mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya:

- a. Bertanggung jawab: Mengakui kesalahan adalah langkah awal untuk bertanggung jawab atas perbuatan seseorang. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mencoba untuk menghindari tanggung jawab atau menyalahkan orang lain atas tindakan mereka.
- b. Menghemat waktu dan sumber daya: Dengan mengakui terus terang, para terdakwa dapat menghemat waktu dan sumber daya yang akan digunakan dalam persidangan. Ini dapat mengurangi biaya hukum dan mempercepat proses peradilan.
- c. Menunjukkan penyesalan : Dengan mengekspresikan penyesalan atas perbuatannya, para terdakwa dapat mencoba untuk mengurangi dampak negatif dari tindakan mereka pada korban atau masyarakat. Ini juga dapat memengaruhi penilaian hakim terhadap mereka dan dapat mempengaruhi keputusan hukum yang diambil.
- d. Mendapatkan pengampunan : Terkadang, mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan dapat memengaruhi keputusan hukum dan dapat menghasilkan hukuman yang lebih ringan daripada jika mereka memilih untuk membantah atau mengajukan pembelaan yang keras.

Meskipun mengakui terus terang dan menyesali perbuatan adalah langkah yang baik dalam proses hukum, penting untuk dicatat bahwa pengakuan ini haruslah bersifat jujur dan tidak dipaksakan. Jika terdapat tekanan atau paksaan yang menyebabkan seseorang mengakui kesalahan yang sebenarnya tidak mereka lakukan, itu akan melanggar prinsip keadilan dan dapat merusak integritas sistem peradilan.

3. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Ketika para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, hal ini biasanya menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam proses hukum.

- a. Rekam Jejak Hukum : Ketika seorang terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki catatan kejahatan sebelumnya. Ini dapat mempengaruhi cara pengadilan memandang terdakwa dan mempertimbangkan keputusan hukum. Dalam beberapa kasus, terutama untuk pelanggaran yang ringan atau pertama kali, hakim mungkin lebih cenderung memberikan hukuman yang lebih ringan atau alternatif, seperti program pasyarakatan atau tindakan rehabilitasi.
- b. Faktor Penyesuaian : Para terdakwa yang belum pernah dihukum mungkin dianggap sebagai kandidat yang lebih baik untuk rehabilitasi atau pemulihan daripada mereka yang memiliki rekam jejak kejahatan. Ini karena mereka mungkin lebih menerima program-program perbaikan yang ditawarkan oleh sistem peradilan untuk mencegah pengulangan tindakan kriminal di masa depan.
- c. Karakter dan Integritas : Kurangnya rekam jejak kejahatan juga dapat dianggap sebagai indikasi karakter dan integritas yang baik dari terdakwa. Ini dapat memengaruhi persepsi hakim dan juri tentang kepribadian dan niat terdakwa, dan dapat memengaruhi penentuan hukuman.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun seorang terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, itu tidak selalu berarti bahwa mereka tidak bersalah atas tuduhan yang mereka hadapi dalam kasus tertentu. Setiap kasus akan dinilai berdasarkan bukti yang disajikan di pengadilan dan pertimbangan hukum yang tepat. Tidak ada jaminan

bahwa terdakwa yang belum pernah dihukum akan mendapatkan perlakuan khusus atau hukuman yang lebih ringan, karena keputusan hukum haruslah didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan prinsip-prinsip keadilan.

Faktor-Faktor Pengaruh Terjadinya Disparitas dalam Penjatuhan Pidana dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika.

Putusan hakim menempatkan posisi sentral dalam sistem peradilan pidana karena putusan pengadilan ini menentukan “nasib” dari terdakwa yang akan mempengaruhi hidupnya dikemudian hari. Maka dari itu putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim hendaknya benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan terpidana khususnya. Putusan yang memenuhi rasa keadilan akan berdampak positif bagi *sustainable development* dan *sustainable society* serta menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat terhadap sistem peradilan pidana sesuai dengan kongres PBB ke 9 dan 10 . Pidana sebenarnya hanya alat untuk mencapai tujuan, proses penjatuhan sanksi pidana oleh hakim merupakan rangkaian pembinaan bagi narapidana di kemudian hari maka dari rasa keadilan harus terpenuhi agar tujuan dari sistem peradilan pidana dapat di capai yaitu sosialisasi dan rehabilitasi terpidana kembali ke masyarakat hal ini akan tercapai jika terpidana merasa telah mendapat keadilan dalam proses tersebut. Namun jika terpidana merasa menjadi korban dari sistem peradilan pidana karena mendapat putusan yang di nilai kurang adil maka akan sulit untuk membina narapidana di kemudian hari⁸.

Berdasarkan hasil penelitian adapun faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada putusan penyalahguna narkotika adalah sebagai berikut :

1. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Bapak Edi Sanjaya Lase, S.H. mengatakan bahwa fakta yang terungkap di persidangan dapat menyebabkan disparitas pidana bagi penyalahguna narkotika misalnya jika dari rangkaian fakta persidangan didapat terdakwa merupakan penyalahguna narkotika seperti dalam pasal 127 (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai penyalahguna namun apabila terdakwa juga menawarkan barang tersebut kepada orang lain/temannya meskipun tidak ada menjual narkotika maka tentu saja hukuman akan lebih berat dari pada terdakwa yang mengkonsumsi narkotika hanya untuk diri sendiri saja meskipun sama-sama sebagai penyalahguna narkotika/pecandu hal ini juga di benarkan oleh Jaksa Andhika mengatakan bahwa fakta persidangan memegang peran penting dalam pembuktian di persidangan hal ini juga mempengaruhi jaksa dalam menilai keterlibatan seseorang sebagai penyalahguna narkotika dan memberikan tuntutan pidana pada persidangan kasus penyalahguna tersebut. Sehingga hal ini menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana meskipun di sangka kan dengan pasal yang sama yaitu pasal 112 (1) dan Pasal 127 (1) huruf a. Namun putusan pidana bisa berbeda⁹.

2. Pengulangan Tindak Pidana

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Bapak Edi Sanjaya Lase, S.H. pengulangan tindak pidana (*recidive*) merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas yang mencolok dalam tindak pidana penyalahguna narkotika Edi Sanjaya Lase mengatakan jika terjadi pengulangan tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika maka secara otomatis majelis hakim pasti menjatuhkan hukuman yang lebih berat yaitu di tambah 1/3 hukumannya terhadap penyalahguna narkotika dan biasanya hukuman maksimal menurut hakim Edi Sanjaya Lase pengulangan tindak pidana merupakan suatu

⁸ Eryka Herlyta, *Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Bengkulu*, University of Bengkulu Law Journal, vol 7(1) 2022.

⁹ Wawancara dengan Bapak Edi Sanjaya Lase, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu 16 April 2024 pukul 10:00 WIB

bentuk tidak adanya penyesalan dan perubahan serta ketaatan hukum pada diri pelaku hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yaitu menciptakan manusia yang lebih baik dikemudian hari maka dari itu menurut Edi Sanjaya Lase ini merupakan faktor pemberatan penyalahguna narkotika dijatuhi pidana yang lebih berat meskipun sebagai penyalahguna narkotika¹⁰.

3. Barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara

Edi Sanjaya Lase mengatakan bahwa barang bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara merupakan faktor penentu hakim dalam menjatuhkan tindak pidana narkotika jika barang bukti shabu misalnya ditemukan di TKP hanya berjumlah dibawah 5 gram dan dipergunakan untuk konsumsi sendiri maka otomatis hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkotika maka penjatuhan pidana akan lebih ringan tentu ini akan menyebabkan terjadinya disparitas putusan pidana hal ini juga di benarkan oleh Jaksa Andika bahwa barang bukti merupakan faktor penentu berat ringan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap penyalahguna narkotika¹¹.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP). Adapun bunyi Pasal 182 ayat (1) KUHAP adalah ¹² :

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat di jawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Pemeriksaan dinyatakan selesai adalah pemeriksaan saksi dan terdakwa, dalam kasus penyalahguna narkotika , jaksa penuntutan umum mengajukan tuntutannya, dalam tuntutan ini disebutkan lamanya pidana penjara. Tuntutan harus diajukan secara tertulis oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun hakim Edi Sanjaya Lase menyatakan bahwa hakim tidak terikat pada tuntutan pidana yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun tuntutan pidana ini harus dimuat dalam putusan pemidanaan dari hakim. Hal ini tertuang dalam Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHAP yaitu surat putusan pidana memuat tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan¹³.

5. Hal yang memberatkan dan meringankan

Putusan hakim yang berupa putusan pidana harus memuat hal-hal memberatkan dan meringankan. Hal ini tertuang dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dari yang meringankan terdakwa. Dalam ayat (2) pasal 197 KUHAP dinyatakan bila tidak dipenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU No 1 Tahun 1981

¹³ Wawancara dengan Bapak Edi Sanjaya Lase, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu 16 April 2024 pukul 11:00 WIB

Menurut hakim Edi Sanjaya Lase hal-hal yang memberatkan dan meringkan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan diperhatikan adalah pelaku, akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, hal yang memberatkan dan meringkan ini dilihat secara perkasus, karena hal yang memberatkan dan meringkan satu kasus dengan kasus yang lainnya berbeda-beda. Menurut Edi Sanjaya Lase hal yang meringkan antara lain terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, bagi pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dipidana dan masih sangat mungkin untuk di bina. Memberikan keterangan dalam persidangan tidak berbelit-belit dan kooperatif, berlaku sopan hal ini juga di ungkapkan oleh Jaksa Andika bahwa jika terdakwa kooperatif, jumlah barang bukti sedikit, berlaku sopan dan bukan residivis maka hal ini diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana. Namun jika terdakwa berbelit-belit serta tidak kooperatif, serta residivis dan sulit untuk di bina merupakan hal yang memberatkan¹⁴.

Berdasarkan pengamatan penulis hal yang memberatkan dan meringkan ini sangat subjektif sekali ini merupakan "hak prerogatif" yang dimiliki hakim tanpa adanya rambu yang jelas mana yang merupakan hal yang memberatkan atau hal yang meringkan seorang terdakwa penyalahguna narkotika seharusnya hakim memiliki indikator terukur mengenai hal yang memberatkan dan meringkan tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral dan etik dari suatu putusan pidana.

6. Ketentuan Pidana yang Dilanggar.

Ketentuan pidana yang dilanggar yaitu Pasal 127 (1) huruf a namun juga mungkin melanggar ketentuan pidana lain . dari 32 kasus yang diambil secara acak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ada juga yang melanggar Pasal 112,111,dan 114 Uu Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana lain itu ada yang hanya satu atau dua ketentuan yang dilanggar. Bila dilakukan hanya satu perbuatan, tetapi melanggar ketentuan pidana dalam hukum pidana dinamakan "*eendaadsche samenloop*" atau *concersus idealis* yang daitur dalam Pasal 63 KUHP yang berbunyi, "Jika suatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan pidana itu, jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya. Jika bagi perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang digunakan."

Dilihat dari ketentuan pasal 63 KUHP diatas, maka terhadap perbuatan penyalahguna narkotika juga melanggar ketentuan 111, 112, UU No 35 Tahun 2009 dikenakan ancaman terberat ancaman pidana pokoknya yaitu 4 tahun penjara paling singkat dan paling lama 12 tahun penjara. Dalam hal penjatuhan pidana yang pertama dilihat apakah unsur-unsur tindak pidana penyalahguna narkotika atau apakah juga terpenuhi unsur-unsur tindak pidana yang lain. Dengan terpenuhi tindak pidana yang lain dipandang sebagai hal yang memberatkan. Dengan demikian akan bisa memperberat dan menentukan lama pidana penjara yang akan dijatuhkan hakim menurut Edi Sanjaya Lase¹⁵.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

KESIMPULAN

Dalam putusan nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl, terdapat faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Para terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba, namun terdakwa juga menunjukkan sikap sopan, mengakui kesalahan, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Disparitas pidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh faktor-faktor seperti fakta-fakta persidangan, barang bukti, tuntutan jaksa, dan ketentuan pidana yang dilanggar. Hakim perlu terus meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan hukum serta memiliki integritas moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat menyajikan putusan yang berkualitas dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Op.cit*, hal 170.
2. *Op.cit*, hal 170.
3. Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal 160.
4. Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hal 4.
5. Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika Dan Napza?*, ALPRIN, Semarang, 2010, hal 1
6. Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 4.
7. Kaha Anwar, *Ensiklopedia Populer Narkoba*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2017.
8. Eryka Herlyta, *Faktor Penyebab Terjadinya Diparias Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Bengkulu*, University of Bengkulu Law Journal, vol 7(1) 2022.
9. Wawancara dengan Bapak Edi Sanjaya Lase, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu 16 April 2024 pukul 10:00 WIB
10. *Ibid.*
11. *Ibid.*
12. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU No 1 Tahun 1981
13. Wawancara dengan Bapak Edi Sanjaya Lase, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu 16 April 2024 pukul 11:00 WIB
14. *Ibid.*
15. *Ibid.*